

## DINAMIKA HUBUNGAN ANTARUMAT BERAGAMA: POLA HUBUNGAN MUSLIM DAN HINDU DI BALI

*Dynamics of Inter-Religious Relations  
The Pattern of Relations between Muslims and Hindus in Bali*

**A. Muchaddam Fahham**

*achmad.fahham@dpr.go.id  
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270*

Naskah diterima: 27 Februari 2017 | Naskah direvisi: 17 Mei 2018 | Naskah diterbitkan: 30 Juni 2018

**Abstract:** *In 2015, in terms of religious harmony in Indonesia, Bali Province was ranked second. The province of Bali received a score of 81.6 percent and was second to the province of NTT which obtained a value of 83.3 percent. The scores on the harmony index shows that generally the relations between religious believers in Bali is harmonious. Nevertheless, this does not mean that Bali is protected from the problems of relations between religious believers. This study aims to explain the pattern of relations between Islamic and Hindu communities in Bali. This study used a qualitative approach, the data were collected through literature studies and interviews with several informants who are selected purposively. The findings showed that the pattern of relations between Muslim and Hindu followers was not a single one, but diverse. There were associative patterns and there were also patterns of dissociative relations. Associative relations were divided into three, namely cooperation, accommodating, and tolerance, while dissociative relations are divided into two, namely competitive and conflict. Factors that encourage the birth of associative relations were historical factors, economic interests, and integration factors. On the other side, the determinants of the birth of a dissociative relations are factors of economic jealousy, lack of understanding of the teachings of Islam, communication and the strong customs implemented in Bali*

**Keywords:** *cooperation, accommodation, competition, conflict, associative, and dissociative*

**Abstrak:** Di tahun 2015, dalam hal kerukunan umat beragama di Indonesia, Provinsi Bali menempati peringkat kedua. Provinsi Bali memperoleh nilai 81,6 persen dan berada di bawah Provinsi NTT yang memperoleh nilai 83,3 persen. Perolehan indeks kerukunan tersebut menunjukkan secara umum hubungan antarumat beragama di Bali adalah harmonis. Meskipun demikian, ini bukan berarti Bali terhindar dari problem hubungan antarumat beragama. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan pola hubungan antarumat Islam dan Hindu di Bali. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, data-datanya dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan beberapa informan yang dipilih secara *purposive*. Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa pola hubungan antarumat Islam dan Hindu tidak tunggal, tetapi beragam. Ada pola hubungan yang asosiatif dan ada pula pola hubungan yang disosiatif. Hubungan yang asosiatif dipilah menjadi tiga yakni kerja sama, akomodatif, dan toleransi, sementara hubungan yang diasosiatif dibagi menjadi dua, yakni kompetitif dan konflik. Faktor yang mendorong lahirnya hubungan yang asosiatif adalah faktor historis, kepentingan ekonomi, dan faktor integrasi. Sementara faktor penentu lahirnya hubungan yang disosiatif adalah faktor

kecemburuan ekonomi, ketidakmengertian terhadap ajaran agama Islam, komunikasi dan kuatnya adat yang berlaku di Bali.

**Kata Kunci:** kerja sama, akomodatif, kompetitif, konflik, asosiatif dan dissosiatif

## Pendahuluan

Dari sisi agama, Pulau Bali tidak saja dihuni oleh masyarakat yang memeluk agama Hindu, tetapi juga oleh masyarakat yang memeluk agama non-Hindu. Hasil sensus BPS 2010 menjelaskan penduduk Bali yang beragama non-Hindu adalah Islam (520.244), Katholik (64.454), Kristen (31.397), Budha (21.156), dan Konghuchu (427), lainnya (282). (BPS Provinsi Bali, 2010).<sup>1</sup> Masyarakat Bali yang multiagama itu, dipandang sebagai masyarakat yang rukun (Ismail, 2010; Wildaniyati, 2018), toleran, saling menghargai, bekerja sama, dan tolong menolong (Suwindia, 2012). Pandangan itu ditegaskan dalam hasil survei Kementerian Agama RI 2015 tentang Indeks Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia yang menempatkan Provinsi Bali pada peringkat kedua dalam perolehan ndeks kerukunan setelah Provinsi NTT. Provinsi NTT memperoleh nilai 83.3 dan Provinsi Bali memperoleh nilai 81.6 (Kemenag RI, 2015). Meskipun memiliki indeks kerukunan tertinggi kedua setelah Provinsi NTT, tidak berarti bahwa hubungan sosial antarumat beragama dalam masyarakat Bali sama sekali tidak ada masalah. Interaksi sosial antarumat beragama yang rukun di Bali ada kalanya diwarnai oleh berbagai masalah yang melahirkan ketegangan interaksi sosial antarumat beragama. Ketegangan interaksi antarumat tersebut terjadi pada interaksi antara umat Hindu dan Muslim. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa interaksi sosial antarumat Hindu dan Muslim di Bali tidak selalu rukun tetapi juga mengalami ketegangan-ketegangan. Dengan kata lain, interaksi sosial antarumat Hindu dan Muslim di Bali bersifat dinamis. Ada kalanya interaksi sosial kedua umat tersebut rukun, kerja sama, dan saling menghormati, tapi ada kalanya interaksi sosial antarumat beragama tersebut mengalami ketegangan-ketegangan yang dipicu antara lain oleh pembangunan tempat ibadah,

pembangunan sarana pendidikan keagamaan, penggunaan jilbab di sekolah, penolakan atas pengembangan wisata syariah dan penolakan atas pendirian bank syariah di beberapa tempat di Bali. Interaksi sosial antarumat Hindu dan Muslim di Bali seperti disebutkan di atas menarik untuk dikaji. Ada dua pertanyaan yang diajukan: Bagaimana pola hubungan Muslim dan Hindu di Bali? Apa saja faktor yang mendorong lahirnya pola hunungan tersebut?

Studi ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan tersebut. Data-datanya dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan berbagai hasil studi tentang interaksi antarumat beragama di Bali yang telah ditulis oleh para peneliti yang tersebar di berbagai karya tulis baik dalam bentuk buku maupun jurnal. Sementara itu, studi lapangan dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan informasi dari informan terpilih yang dipandang mengetahui dan memahami interaksi antarumat beragama yang terjadi dalam masyarakat Hindu dan Muslim di Bali. Hasil studi pustaka dan studi lapangan tersebut kemudian dikategorisasi dan diklasifikasi sesuai dengan tujuan studi ini, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang menggambarkan pola interaksi dan faktor yang mendorong interaksi antarumat Hindu dan Muslim di Bali.

## Pola Hubungan Muslim dan Hindu di Bali

Mayoritas masyarakat Bali merupakan pemeluk agama Hindu, tetapi Islam bukan merupakan agama yang asing bagi mereka. Islam merupakan agama yang telah lama hidup dan berkembang di tengah-tengah mereka. Secara historis, perjumpaan antara Islam dan Hindu di Bali telah berlangsung sejak lama. Beberapa studi yang telah dilakukan misalnya oleh Kartini (2011), Masyad (2014), dan Diana (2016) menyebutkan bahwa Islam masuk ke Bali sejak zaman kerajaan Majapahit saat kerajaan tersebut diperintah oleh Raja Hayam Wuruk (1350-1389 M) dan terus berkembang sampai sekarang.

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, "Penduduk Provinsi Bali Menurut Agama yang Dianut Hasil Sensus Penduduk 2010," <http://bali.bps.go.id/2018>, diakses 24 Mei 2018.

Hubungan Muslim dan Hindu di Bali, dengan demikian bukan hal baru. Hubungan kedua umat tersebut telah terjalin lama dan melahirkan pola hubungan yang dinamis.

Dalam studi sosiologi (Soekanto, 2012: 264) hubungan sosial dimaknai sebagai hubungan yang terjadi antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dan kelompok lainnya, atau antara kelompok dengan individu. Hubungan sosial juga dipandang sebagai hubungan sosial yang dinamis dan dibagi menjadi dua bentuk, yakni hubungan sosial yang asosiatif dan disosiatif. Pola hubungan asosiatif merupakan pola hubungan yang positif, bersifat mempersatukan dan menghasilkan keteraturan. Pola hubungan yang asosiatif merupakan proses sosial yang harmonis. Pola hubungan sosial yang asosiatif dibagi tiga, yakni kerja sama, akomodasi, dan asimilasi. Kerja sama akan terjadi jika orang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang sama memiliki cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri mereka. Faktor pendorong lahirnya kerja sama adalah kepentingan bersama. Akomodasi merupakan suatu proses adaptasi atau penyesuaian diri. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menafikan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Asimilasi merupakan proses sosial untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada pada orang perorang atau kelompok-kelompok. Selain itu asimilasi juga ditujukan untuk meningkatkan kesatuan tindak dan sikap agar tujuan bersama dapat dicapai. Asimilasi dapat berupa asimilasi kultural dan asimilasi struktural. Asimilasi kultural merupakan proses adaptasi nilai, kepercayaan, dogma ideologi, bahasa, dan sistem simbol dari suatu kelompok, sehingga terbentuk budaya atau kultur baru. Sementara asimilasi struktural merupakan proses penetrasi budaya dari suatu kelompok ke dalam kelompok lain melalui kelompok primer, seperti keluarga, teman dekat, dan klik (kelompok kecil) dalam kelompok (Tobroni, 2012: 66-67).

Pola hubungan disosiatif disebut juga dengan *oppositional processes*, yakni hubungan sosial

yang bersifat pertentangan dengan orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan. Pola hubungan disosiatif dibagi tiga, yakni persaingan (*competition*), kontroversi (*controversy*), dan pertentangan atau pertikaian (*conflict*). Persaingan merupakan proses sosial di mana individu atau kelompok manusia bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu waktu tertentu menjadi perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Ada beragam bentuk persaingan, di antaranya adalah persaingan ekonomi, budaya, status sosial, dan etnik atau ras. Dua pola hubungan tersebut digunakan untuk memotret dinamika pola hubungan Muslim dan Hindu di Bali.

### **Kerja Sama**

Kerja sama antara Muslim dan Hindu di Bali telah terbangun sejak era Kerajaan Bali. Kerja sama tersebut terjadi seiring dengan migrasi orang-orang Islam ke Bali (Atmadja, 2010: 426). Di era kerajaan Bali, salah satu kerja sama yang dikembangkan oleh umat Hindu dan Muslim adalah kerja sama di bidang militer. Kerja sama tersebut dapat ditelusuri di era kerajaan Buleleng, Badung, dan Jembrana. Di tahun 1587 Raja Buleleng, Panji Sakti membawa laskar Muslim asal Bugis-Mandar dari Blambangan ke Buleleng. Laskar muslim tersebut pada mulanya bermarkas di Prampang-Blambangan kemudian dibawa oleh Panji Sakti guna membantu pertempuran memperebutkan Blambangan dari kekuasaan kerajaan Mataram (Kartini, 2011: 128).

Menurut Mashad (2014: 190), ketika kerajaan Bali terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil, banyak raja dari kerajaan kecil tersebut yang menjalin kerja sama dengan orang-orang Muslim Bugis dan Jawa-Madura untuk mempertahankan kerajaan mereka dari serangan kerajaan kecil lainnya. Dalam catatan Kartini (2011: 128), tahun 1770 Raja Badung Cokorde Pemecutan berusaha menyerang kerajaan Jembrana dari arah selatan Desa Perancak, namun serangan itu berhasil dipatahkan oleh pasukan kerajaan Jembrana yang didukung oleh orang-orang

Muslim Bugis-Makassar. Pada tahun 1828 terjadi peperangan kedua kalinya antara kerajaan Jembrana dan kerajaan Buleleng. Peperangan ini dimenangkan oleh kerajaan Jembrana. Pasukan Jembrana yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Gde diperkuat oleh pasukan Muslim dan berhasil mengalahkan pasukan Buleleng dan menewaskan Raja Anak Agung Gde. Saat kerajaan Badung berperang melawan kerajaan Mengwi tahun 1891, Raja Badung juga menggunakan prajurit-prajurit Muslim asal Serangan dan Kepaon guna membantunya dalam memenangkan peperangan melawan Mengwi. Ketika Anak Agung Putu Handul menjadi Raja Jembrana III, Raja Jembrana ini juga menggunakan orang-orang Bugis-Makassar Muslim untuk membantu pasukan Jembrana memukul mundur pasukan Raja Tabanan yang mencoba menyerang Jembrana.

Kerja sama penguasa kerajaan dengan laskar-laskar Muslim terus terjalin tidak hanya pada saat kerajaan Bali terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil tetapi juga pada saat masuknya kolonial Belanda ke Bali. I Gusti Ketut Jelantik misalnya, adalah patih kerajaan Buleleng yang populer di era perang Buleleng melawan kolonial Belanda. Pada 1846 I Gusti Ketut Jelantik berhasil memukul mundur Belanda dari Buleleng. Keberhasilan tersebut berkat bantuan laskar Bugis-Muslim dari Jembrana dan Buleleng yang membendung jalur masuk pasukan Belanda ke Buleleng (Kartini, 2011:128). Meskipun akhirnya pada April 1849 Hindia-Belanda berhasil mengalahkan Pasukan Buleleng-Jembrana (Bali), namun secara historis partisipasi pasukan Muslim dalam mempertahankan Bali dari penjajah tak bisa dipungkiri (Mashad, 2014: 238).

Kerja sama Muslim dan Hindu di Bali pada era kerajaan juga tampak pada permukiman. Sebagian besar permukiman Muslim saat itu merupakan pemberian Raja atas jasa besar warga Muslim yang telah membantu kerajaan dalam berbagai peperangan. Saat ini, permukiman Muslim tersebut masih dapat ditemukan di berbagai wilayah di Bali. Hingga saat ini berbagai permukiman itu masih dapat dijumpai di Klungkung, Badung, Denpasar, Buleleng, Jembrana, Tabanan, Karangasem,

Gianyar, dan Bangli (Mashad, 2014: 131-180). Perkampungan Muslim di Pegayaman, Buleleng misalnya, merupakan tempat yang diberikan oleh Raja Panji Sakti bagi laskar Muslim yang telah membantu kerajaan Buleleng dalam peperangan memperebutkan Blambangan. Para punggawa yang dikirim dari Jawa untuk menggembala gajah pemberian Raja Mataram juga diberikan tempat bermukim di Pegayaman dan Tegallingah. Demikian pula di kerajaan Badung, Raja Pamecutan III menghadiahkan tempat pemukiman di Kepaon bagi Raden Sastraningrat dan pengikutnya dari Jawa-Madura yang telah berjasa membantu kerajaan Badung mengalahkan Kerajaan Mengwi (Kartini, 2011: 129).

Selain militer dan permukiman, kerja sama Muslim dan Hindu juga terjadi di bidang pertanian, terutama pada lembaga subak. Subak adalah sistem irigasi di Bali yang telah ada sejak lama dan diwariskan secara turun temurun. Subak juga merupakan sistem irigasi tradisional yang bercorak sosio-religius yang didasarkan atas filosofi Tri Hita Karana, yang bermakna untuk menjaga keselarasan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya serta manusia dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, subak disebut bercorak sosio-religius (Atmadja, 2010: 308). Selain itu, dalam implementasinya, sistem subak dilandasi oleh jiwa dan semangat gotong royong yang tinggi dari pengelola dan para anggotanya (Suputra, 2008). Anggota lembaga subak pada umumnya tidak saja berasal dari pemeluk Hindu, tetapi juga berasal dari pemeluk Islam. Kerja sama pengelolaan subak masih terjadi hingga sekarang seperti yang dipraktikkan para pengelola Subak Pancoran di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng (Arta, 2010: IV). Komunitas Muslim Bali yang bergerak di bidang pertanian lazim bergabung dalam lembaga subak. Dalam lembaga subak ada kesepakatan-kesepakatan yang unik dan berubah sesuai konteks zamannya. Anggota subak dari kalangan Muslim di Desa Banyubiru misalnya, pada awalnya mereka memiliki dua kewajiban, yakni membayar iuran pembagian air dan iuran untuk ritual yang dilakukan pemeluk

Hindu di pura. Namun dalam perkembangannya kewajiban itu diubah. Kelompok Muslim bergabung dalam lembaga subak hanya dibebani kewajiban membayar iuran pembagian air dan tidak lagi membayar iuran untuk kepentingan ritual pura. Meskipun demikian, kelompok Muslim tetap terlibat dalam kerja-kerja di luar ritual pura, misalnya kerja sama untuk membangun bendungan dan pemeliharaan fisik subak.

Pemeliharaan fisik subak meliputi pemeliharaan *bale subak* (bangunan milik organisasi subak digunakan sebagai tempat rapat subak), *pura bedugul* (tempat pemujaan yang berkaitan dengan wilayah subak dan pelaksanaan pertanian), *empelan* (bendungan air), *aungan* (terowongan air), dan *telabah* (saluran air). Pemeliharaan bangunan fisik tersebut melibatkan semua komponen anggota yang berbeda agama, baik masyarakat beragama Hindu, Islam, Kristen, maupun Budha. Kerja sama pemeliharaan fisik subak tampak pada kegiatan *matelik* (perbaikan saluran air) maupun pemeliharaan *empelan* (bendungan air). Masing-masing anggota subak mendapat tugas-tugas memelihara kondisi fisik subak secara adil dan merata tanpa memandang agama yang dianut. Ada kelompok yang bertugas mengatur air, memelihara saluran air, maupun memelihara bendungan. Masing-masing kelompok bertanggung jawab atas keadaan bendungan, kelancaran pasokan air, maupun pengaturan pembagian air. Sementara itu, pemeliharaan fisik yang agak berat dan membutuhkan tenaga besar, pembagian kelompok tugas tidak berlaku. Seluruh anggota bekerja sama mengatasi pekerjaan tersebut, misalnya perbaikan bendungan jebol atau pun memperbaiki *bale* subak. Khusus untuk perbaikan *pura* subak, masyarakat Muslim tidak ikut terlibat, perbaikan hanya dilaksanakan oleh pihak anggota yang beragama Hindu. Biaya perbaikan ditanggung bersama, baik masyarakat Hindu maupun masyarakat non-Hindu (Armini, 2013: 39-53). Hal lain yang menarik dalam lembaga subak adalah *nandu*, yakni sistem bagi hasil antara kelompok Muslim sebagai penggarap sawah dengan pemeluk Hindu sebagai pemilik

sawah. Sistem ini telah berlaku sejak lama di tengah-tengah masyarakat Hindu di Bali, sebab ketika komunitas Muslim pertama kali datang ke Bali mereka bukan pemilik tanah (Kartini 2011: 129).

Secara historis kerja sama orang-orang Islam dan Hindu di Bali dalam bidang perdagangan juga telah terjalin sejak masa kerajaan. Gejala ini menurut Atmadja (2010: 316) tampak pada pelabuhan Kota Banding atau Tebading di pantai Desa Pakraman Kubutambahan (Kawista), Buleleng. Menurut Kartini (2011: 116) orang-orang Bugis-Islam yang berprofesi sebagai pedagang menyalurkan hasil bumi seperti beras dan kelapa, ke luar Bali dan membawa kain, alat rumah tangga, alat-alat pertanian dan sebagainya ke Bali. Orang-orang Bugis-Islam ini mampu melakukan hal tersebut karena memiliki perahu dagang. Besarnya peran orang-orang Bugis-Islam bagi kemajuan ekonomi Bali saat itu mendorong beberapa kerajaan kecil di Bali untuk memberi mereka hak untuk bermukim di Bali. Ketika orang-orang Muslim ini bermukim di Bali hubungan masyarakat Muslim dengan Hindu menjadi sangat intens. Dampaknya kemudian adalah lahirnya konversi agama dan sistem kekerabatan melalui lembaga perkawinan. Di Buleleng misalnya, salah seorang keluarga raja pada era kerajaan ada yang beralih agama, dari Hindu ke agama Islam. Hal demikian bisa dilihat pada salah seorang keluarga Raja Buleleng, I Gusti Ketut Tubun atau Imam Wasir Ketut Tubun memeluk agama Islam, kemudian diangkat menjadi punggawa yang mengepalai desa-desa Islam di pantai utara Buleleng pada awal abad ke-19.

### Akomodatif

Muslim Bali memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan budaya Bali yang mengitarinya. Kemampuan adaptasi itu melahirkan budaya Muslim Bali yang unik. Di antara budaya tersebut adalah *ngejot* dan *megibung*. *Ngejot* merupakan kebiasaan Muslim Bali mengantarkan makanan kepada tetangganya yang Muslim maupun yang Hindu (Nuryahman, 2015: 327-334). Tradisi tersebut pada mulanya merupakan tradisi umat Hindu Bali saat perayaan Galungan, Nyepi, dan Kuningan. Tradisi ini

kemudian diadaptasi umat Islam Bali. Mereka melakukan *ngejot* saat menjelang perayaan Idul Fitri, Maulid Nabi saw, dan Idul Adha. Kata *ngejot* dalam bahasa Bali berarti “memberi.” Dalam *ngejot*, umat Islam maupun umat Hindu memberikan makanan, jajanan, atau buah-buahan. Tradisi *ngejot* dipandang sebagai penanda kerukunan antarumat Muslim dan Hindu di Bali. Sampai saat ini tradisi *ngejot* masih dipraktikkan baik oleh masyarakat Muslim maupun masyarakat Hindu Bali. Di Desa Pegayaman misalnya, masyarakat Islam melakukan *ngejot* saat perayaan Idul Fitri, Maulid Nabi, dan Idul Adha. Sementara masyarakat Hindu Bali juga melakukan *ngejot* ketika memperingati Hari Raya Galungan. Pada hari raya tersebut, masyarakat Hindu Bali membagikan buah-buahan kepada masyarakat Islam (Soviawan, 2013: 9).

Tradisi lain yang unik adalah *megibung* yakni tradisi makan bersama-sama dalam satu dan waktu tertentu. Biasanya dilakukan setiap tanggal 10 Ramadan. Menu utama dalam makan bersama tersebut adalah nasi tumpang dengan lauk daging sapi dan ayam cincang yang diberi bumbu *kedoteng*, yakni racikan dari rempah-rempah lengkap sebagai penyedap utama sajian khas pada Hari Raya Galungan dan Kuningan. *Megibung* berasal dari kata *gibung* yang mendapat awalan *me* sehingga menjadi *me-gibung* berarti kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang yang saling berbagi antara orang yang satu dengan lainnya. Tradisi *megibung* pada mulanya merupakan tradisi umat Hindu kemudian diadaptasi oleh umat Islam Bali. Tradisi *megibung* yang dilakukan umat Islam Bali dapat ditemukan di Kampung Islam Kepaon. Umat Islam di kampung tersebut melaksanakan *megibung* sebanyak tiga kali, yakni setiap hari ke-10, ke-20, dan ke-30 bulan Ramadan. Sementara tradisi *megibung* yang dilakukan oleh umat Hindu dapat ditemukan di Karangasem terutama saat dilakukannya upacara-upacara adat seperti upacara Odolan, Ngaben, Metatah dan Pawiwahan (Wulandari, 2017: 29-40).

Adaptasi masyarakat Islam Bali terhadap kultur umat Hindu juga tampak pada arsitektur bangunan rumah yang dikembangkan oleh

masyarakat di Pegayaman Buleleng. Arsitektur rumah masyarakat Islam di desa tersebut mengadaptasi arsitektur bangunan milik masyarakat Hindu di Bali (Prasetya, 2012: 57). Beberapa arsitektur bangunan masjid di Bali juga menyerap arsitektur bangunan khas Bali. Masjid Jami Singaraja misalnya ditemukan pola ornamen Bali dan simbol swastika pada pintu masjid. Mihrab masjid tersebut polanya mirip pelinggih Bathara. Pola *meru* juga dapat dilihat pada Masjid Keramat di Kajanan (Buleleng). Di kampung Gelgel, bentuk masjid tidak berbentuk kubah yang menjadi ciri asli seni arsitektur Islam, melainkan berbentuk tumpang yang biasanya terdapat pada bangunan suci umat Hindu (Kartini, 2011: 133).

Adaptasi masyarakat Muslim Bali juga tampak pada penggunaan nama untuk anak-anak mereka. Nama-nama masyarakat Bali seperti Putu, Made, Kadek, dan Ketut juga dipakai masyarakat Islam Kepaon sebagai julukan untuk anak-anak mereka. Bedanya, nama-nama khas Bali yang menunjukkan urutan kelahiran dalam keluarga itu tidak diformalkan secara administratif, melainkan hanya sebuah panggilan sehari-hari (Nuryahman, 2015: 332).

Masyarakat Muslim Bali juga berupaya menyesuaikan bahasa yang digunakannya dengan Bahasa Bali. Upaya demikian dapat ditemukan pada masyarakat Islam Pegayaman. Masyarakat Muslim di Pegayaman secara historis berasal dari Jawa dan Bugis, tetapi bahasa ibu yang mereka gunakan adalah Bahasa Bali. Tidak heran jika mereka fasih berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Bali. Bahasa Bali yang berkembang dalam komunitas Islam Pegayaman juga hampir sama dengan Bahasa Bali yang berkembang pada masyarakat Bali umumnya. Mereka mengenal *angghah-ungguh* Basa Bali yakni Basa Bali *alus*, *madya* dan *kesamen*. Masyarakat Islam Pegayaman tidak mengenal pelapisan masyarakat berdasarkan keturunan (*received status*) seperti yang terjadi pada masyarakat Bali. Penggunaan *angghah-ungguh* Basa Bali hanya sebatas pada lawan bicara. Basa Bali *alus* digunakan saat berkomunikasi dengan orang yang dihormati seperti *penglingsir*,

tokoh adat dan agama, atasan, pejabat desa, dan sebagainya. Basa Bali *madya* digunakan dalam kehidupan keseharian kepada orang yang dituakan seperti orang tua, paman, orang baru dikenal dan sebagainya. Sementara itu, Basa Bali *kesamen* digunakan dalam interaksi sosial sehari-hari dengan teman sebaya (Budarsa, tt:5).

Upaya masyarakat Muslim Bali untuk menyesuaikan diri dengan kultur masyarakat Hindu Bali juga tampak pada perayaan hari besar keagamaan. Masyarakat Muslim di Pegayaman (Buleleng) misalnya saat melakukan perayaan Maulud Nabi, utamanya hari pertama tanggal 12 Rabiul Awal, membuat *sokok base* rangkaian daun sirih, kembang, dan buah-buahan. *Sokok base* ini mirip dengan *pajegan* yang dibuat masyarakat Hindu Bali saat upacara hari-hari tertentu. Puluhan *sokok base* dibawa ke masjid dan dideretkan di tengah-tengah lingkaran orang yang membacakan barzanji (karya sastra Arab klasik yang berisi riwayat dan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW). Kemudian pada hari kedua tanggal 13 Rabiul Awal warga membuat *sokok taluh* untuk merayakan *muludan taluh* (muludan telur) dengan membuat *grodok maulud* berisikan rangkaian serupa *sokok base* namun dilengkapi dengan telur dan buah-buahan yang disusun pada batang pisang. Sebelum dibawa ke masjid, *sokok* ini diarak keliling desa disertai dengan iringan musik rebana dan atraksi pencak silat. Sesampainya di masjid, dilakukan doa dan zikir bersama yang dilanjutkan dengan ceramah agama oleh imam masjid. Di akhir prosesi, *sokok base* dan *sokok taluh* dibongkar dan isinya dibawa pulang warga untuk mendapatkan berkah doa sekaligus penolak bala (Kartini, 2011:133).

Tradisi lainnya di Pegayaman tampak dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada kedua hari raya itu masyarakat Muslim Pegayaman melaksanakan salat id sama seperti Muslim lainnya. Namun, yang menarik adalah mereka menambahkan rangkaian hari-hari menjelang hari raya Idul Fitri, yakni *penapean*, (hari membuat tape pada hari ke-3 menjelang Idul Fitri), *penyajaan* (hari membuat jajan uli pada hari ke-2 menjelang Idul Fitri), dan *penampahan* (hari memotong hewan dan mengolah daging

sapi sehari menjelang Idul Fitri), dan *manis lebaran* (sehari setelah hari H). Rangkaian tradisi ini sama seperti yang dilakukan umat Hindu menjelang hari Galungan, namun bagi Muslim bukan merupakan bentuk ibadah (Kartini, 2011: 133). Pelaksanaan salat Idul Fitri di Desa Pegayaman dibagi dua waktu, *pertama*, untuk kalangan perempuan dilaksanakan pada pukul 07.00 WITA di musala masing-masing. *Kedua*, untuk kalangan laki-laki dilaksanakan pada pukul 09.00 WITA di Masjid Safinatussalam. Menurut Wayan Muhajir, pemisahan demikian dilakukan semua warga muslim yang melaksanakan salat Idul Fitri dapat melaksanakannya dengan tenang dan hikmat. Karena saat ibu-ibu dan remaja Muslimah melaksanakan salat, bapak-bapak bertugas menjaga anak-anak yang masih kecil di rumah masing-masing begitu juga sebaliknya (Tirthayasa, 2015: 1).

Mengapa komunitas Islam mampu beradaptasi dengan tradisi lokal di Bali? *Pertama*, komunitas Islam yang masuk ke Bali merupakan komunitas Islam yang sebelumnya telah terbiasa beradaptasi secara sukarela dengan tradisi Hindu-Budha yang ada di Jawa. Ketika masuk ke Bali mereka dapat menyesuaikan diri tanpa banyak kendala. Meskipun melakukan adaptasi budaya, komunitas Islam Bali tetap mampu memegang prinsip-prinsip ajaran agamanya. Apalagi tradisi lokal yang mereka temui di Bali hampir sama dengan tradisi lokal yang ada di Jawa. *Kedua*, adaptasi komunitas Islam dengan tradisi lokal Bali itu juga merupakan upaya mereka untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat Hindu Bali secara damai dan menghindari konflik antarbudaya. Ketika komunitas Islam hadir di Bali, mereka merupakan komunitas asing bagi masyarakat Hindu Bali. Komunitas Islam yang asing itu, perlu menunjukkan keberislaman dengan wajah lokal. Apa yang dilakukan oleh komunitas Islam di Bali itu dapat dipandang sebagai strategi penyebaran Islam yang telah lazim terjadi di Jawa, yakni melakukan adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Nusantrara (Qomar, 2015: 318).

## Toleransi

Secara historis hubungan antara umat Islam dan Hindu di Bali adalah harmonis. Kedua komunitas agama tersebut saling menghormati, bahkan seperti telah disinggung di atas, kedua komunitas saling bekerja sama, dan komunitas Islam berusaha untuk beradaptasi dengan kultur masyarakat Hindu Bali sehingga tercipta kultur Muslim Bali yang unik. Pertanyaannya adalah mengapa di era lama hubungan komunitas Islam dan Hindu Bali tersebut harmonis? Menurut Mashad (2014: 190-204) hubungan harmonis dua komunitas berbeda itu ditentukan setidaknya oleh dua faktor, *pertama*, faktor keterkaitan sosio-historis komunitas Muslim dan Puri. *Kedua*, faktor hubungan kekerabatan Muslim dan Hindu Bali.

Faktor *pertama*, hampir semua komunitas Islam di kampung-kampung Islam era lama di Bali memiliki keterkaitan sosio-historis dengan puri. Puri dikenal sebagai tempat tinggal bangsawan Bali, terutama mereka yang merupakan keluarga dekat raja-raja Bali. Menurut pembagian triwangsa atau kasta, puri ditempati oleh bangsawan berkasta kesatria. Kedekatan sosio-historis komunitas Islam dan puri berawal di Kerajaan Gelgel, ketika Prabu Hayam Wuruk (1350-1389) memberi hadiah empat puluh orang pengiring beragama Islam kepada Dalem Ketut Ngelesir (1380-1460). Pemberian hadiah itu terjadi saat Raja Gelgel itu pulang ke Bali setelah melakukan kunjungan ke Majapahit. Empat puluh Muslim tersebut menetap di Bali dan menjadi abdi dalem yang setia kepada kerajaan Gelgel (Mashad, 2014:192). Empat puluh Muslim itulah yang kemudian menjadi cikal bakal Kampung Islam di Gelgel dan Klungkung (Atmadja, 2010:283). Kedekatan sosio-historis komunitas Islam dan puri tidak hanya terjadi di Gelgel dan Klungkung tetapi juga terjadi di hampir semua puri di Bali, seperti Tabanan, Buleleng, Denpasar-Badung, Jembrana, dan Karangasem (Mashad, 2014:193-202). Masing-masing puri memiliki kisah kedekatan sosio-historis yang unik, Kedekatan sosio-historis puri Tabanan dengan komunitas Muslim misalnya berawal dari jalinan perkawinan keluarga puri dengan tokoh Islam. Adalah Aryo Nur Alam

pemuda Islam asal Blambangan datang ke Bali tahun 1808 di usia 15 tahun dan diangkat sebagai juru bahasa keraton karena kemampuannya menerjemahkan surat-surat berbahasa Jawa yang diterima oleh raja Tabanan, Batara Ngeluhur. Nur Alam dikenal berperangai baik dan berloyalitas tinggi. Raja Tabanan pun terkesan kemudian mengawinkannya dengan salah seorang putrinya. Raja Tabanan juga memberinya tanah pelungguhan. Tanah pelungguhan tersebut hingga saat ini dikenal sebagai Kampung Jawa atau Banjar Tunggal Sari dan merupakan Kampung Islam di Tabanan. Di Buleleng ada kampung Islam Pagayaman. Keberadaan kampung tersebut merupakan penanda adanya kedekatan sosio-historis komunitas Islam dengan puri. Ada tiga kisah yang menjelaskan awal mula terbentuknya Kampung Islam Pagayaman. Kisah pertama menjelaskan bahwa Kampung Pagayaman terbentuk setelah pasukan Mataram menaklukkan Jawa Timur (Giri Kedaton) tahun 1635. Kemenangan ini mendorong Raja Buleleng mengundang sebagian pasukan Mataram untuk menjadi pasukan bayaran untuk menjaga atau menghadapi ancaman keamanan dari kerajaan lain di Bali. Kisah kedua menjelaskan bahwa Kampung Islam Pagayaman terbentuk dari pemberian tanah sebagai tempat tinggal pawang gajah dari Mataram. Raja Mataram memberi raja Buleleng seekor gajah berikut tiga orang pawang. Dua orang diberi tempat tinggal di Banjar Jawa sementara satu lagi tinggal di Pantai Lingga (Atmadja, 2010: 285).

Relasi sosio-historis komunitas Islam dan Hindu di Denpasar-Badung, terjadi karena kepentingan politik, pertahanan dan perkawinan. Komunitas Islam di Denpasar-Badung dapat ditemukan di desa Kepoan. Cikal bakal komunitas Islam di Kepoan berasal dari Madura. Raden Suryadiningrat seorang pangeran dari kerajaan Bangkalan yang terdampar di Sanur kemudian membantu Raja Pemecutan dalam mempertahankan kerajaannya yang saat itu sedang berperang melawan kerajaan Mengwi. Raja Pemecutan menang dalam peperangan melawan Raja Mengwi atas bantuan Pangeran Raden Suryadiningrat (Suwindia, 2012: 53-76).

Setelah kemenangan itu, Pangeran Suryadiningrat kemudian mempersunting Ni Ayu Rai, Putri Raja Pemecutan, setelah pernikahan pangeran Suryadiningrat membawa sang putri ke Madura dan memeluk Islam serta berganti nama menjadi Dewi Katijah (Atmadja, 2010: 294). Setelah pengetahuan agamanya matang, Suryadiningrat membawa sang putri kembali ke Bali. Kedatangan Suryadiningrat dan sang putri disambut dengan baik oleh Raja Pemecutan, namun ketika sang raja mengetahui bahwa putrinya telah memeluk Islam, sang raja kemudian mengasingkannya di Kebon yang saat ini dikenal sebutan desa Kepoan (Nuryahman, 2015:327-334). Hubungan Puri Pemecutan dan Kampung Islam Kepoan hingga saat ini masih terjaga dengan baik, hingga saat ini komunitas Islam Kepoan masih menganggap dirinya sebagai anak buah Puri Pemecutan (Atmadja, 2010: 293).

Kedekatan sosio-historis juga ditemukan di Puri Karangasem. Menurut Agung dalam Atmadja (2018:293) sebagai pusat pemerintahan, puri Karangasem dikelilingi perkampungan Islam yang ditata penempatannya guna mewujudkan kerukunan antarumat beragama. Kampung Islam digunakan sebagai benteng pertahanan. Mereka disusun dalam dua lapisan permukiman yang mengelilingi puri. Studi Mashad (2014: 194) menjelaskan penempatan perkampungan komunitas Islam sebagai benteng pertahanan memang masuk akal, karena komunitas Islam yang datang dari kerajaan Selaparang (Lombok) adalah orang-orang yang memiliki keberanian dan kekuatan. Uniknyanya komunitas Islam yang didatangkan adalah mereka yang sudah berkeluarga atau suami-istri dan ditempatkan di sekeliling puri Kanginan sebagai tempat raja. Hampir semua kampung Islam di Karangasem pada awalnya berfungsi sebagai benteng keamanan puri.

Berbeda dengan yang terjadi di Denpasar-Badung, faktor sosio-historis yang mendekatkan hubungan Muslim dan Hindu Bali di Jembrana adalah faktor ekonomi. Komunitas Islam yang datang ke Jembrana adalah komunitas Islam asal Kesultanan Goa yang datang ke Jembrana setelah kesultanan Goa ditaklukkan Belanda.

Mereka datang ke Jembrana dengan perahu-perahu dagang dan membawa berkah ekonomis bagi Jembrana. Daerah itu kemudian menjadi ramai dikunjungi oleh para pedagang dan tidak lagi terisolir dari dunia luar (Mashad, 2014:195). Selain komunitas Islam Bugis, Jembrana juga didatangi oleh komunitas Islam dari Melayu Pontianak. Salah satu pimpinan komunitas Islam Melayu Pontianak itu adalah Syarif Abdullah bin Yahya Al-Qadri. Komunitas ini menetap di Loloan atau disebut juga dengan Bandar Pancoran. Komunitas Islam Bugis dan Melayu Pontianak ini kemudian melakukan hubungan perkawinan. Perkembangan komunitas Islam yang cukup pesat di Loloan itu mendorong Raja Jembrana untuk memberikan izin kepada komunitas Islam untuk mendirikan masjid pada tahun 1848. Hingga sekarang Loloan masih menjadi komunitas Islam yang cukup terkenal di Kabupaten Jembrana (Atmadja, 2010:322).

Faktor *kedua*, hubungan harmonis komunitas Islam dan Hindu di Bali disokong oleh hubungan kekerabatan Muslim-Hindu Bali. Hubungan kekerabatan tersebut diikat oleh tali perkawinan antara Muslim dan Hindu Bali. Salah satu penanda yang paling sering disebut adalah kasus perkawinan Pangeran Sosroningrat adalah seorang Muslim asal Madura (Mataram) dengan putri Raja Badung. Seperti sudah disebut sebelumnya, perkawinan tersebut mendekatkan hubungan komunitas Islam Kepoan dengan puri Pemecutan serta masyarakat Hindu Bali pada umumnya. Hubungan kekerabatan melalui perkawinan tidak saja terjadi di Kepoan, tetapi juga terjadi di desa-desa lain seperti Pengastulan, Banyu Poh, Tegallinggah, Buleleng, dan Julah. Hubungan kekerabatan melalui perkawinan seperti itu menurut Atmadja (2010:211) merupakan modal sosial dalam toleransi. Praktik perkawinan yang terjadi adalah perkawinan silang antara umat Islam dan Hindu. Sebagian wanita Muslimah di Kampung Kepoan yang kawin dengan lelaki Bali beralih memeluk Hindu. Sebaliknya sebagian wanita Bali yang kawin dengan lelaki-Muslim beralih memeluk agama Islam. Praktik demikian melahirkan praktik interaksi sosial yang harmonis. Ikatan keluarga berdasar

perkawinan itu juga melahirkan rasa saling memiliki, aksi saling mengunjungi dan tolong menolong dalam berbagai masalah yang mereka hadapi. Ikatan kekerabatan antarumat Islam dan Hindu Bali ini juga melahirkan kesadaran tentang makanan yang boleh dimakan oleh keluarga mereka yang Muslim. Karena itu ketika keluarga Hindu mengundang mereka dalam acara-acara ritual daur hidup, keluarga Hindu menyiapkan makanan yang tidak mengandung babi yang disebut *lawar selam*. Di beberapa desa yang dwi agama seperti Banyu Poh dan Baturiti selalu menyediakan *lawar selam*, bahan baku dan pengerjaannya diserahkan kepada tetangga atau kerabat mereka yang Muslim agar makanan yang mereka sediakan terjamin kehalalannya.

Kedekatan relasi komunitas Islam dan Hindu Bali melalui ikatan perkawinan, relasi sosial antartetangga yang berbeda agama melahirkan pandangan *nyama selam* di kalangan umat Hindu Bali. Dengan kata lain, bagi orang Hindu Bali, orang Islam adalah *nyama* (kerabat) mereka. Sebaliknya orang Islam menyebut orang Bali sebagai *nyama* Bali. Pandangan terhadap orang lain sebagai kerabat merupakan salah satu asas interaksi sosial masyarakat Hindu Bali. Asas ini dikenal dengan istilah *menyama braya* (Suda, tt: 2). Secara bahasa *nyama* berarti saudara yang memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan, sementara itu, *braya* berarti masyarakat atau komunitas, tempat di mana orang Bali hidup bermasyarakat dengan tingkat terkecil disebut banjar. Dalam pandangan tradisional orang Bali, orang lain, meskipun tidak memiliki hubungan persaudaraan sedarah merupakan bagian dari keluarga atau komunitas (Fajriyah, tt: 5). Dalam *menyama* pluralitas agama dipahami sebagai suatu kesejajaran, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, orang lain yang berbeda agama, suku, dan ras adalah kerabat. Di masa lalu berdasarkan *menyama* umat Islam dan Hindu Bali hidup rukun tanpa konflik (Tantra, 2015: 134).

Seiring dengan berjalannya waktu, *menyama braya* yang menjadi dasar hubungan relasi sosial bagi masyarakat Bali mengalami pergeseran, bagi masyarakat Bali *nyama selam* dan *nyama Jawa*

yang dulu berarti saudara Islam atau saudara Jawa kini berubah menjadi *jelama Jawa* yang berarti orang luar berasal dari Jawa bukan orang Bali (Damayana, 2011: 91).

Pergeseran makna itu menggerus aspek sosio-historis hubungan harmonis umat Islam dan Hindu yang telah berjalan ratusan tahun. Kerukunan hidup antara umat Islam dan Hindu Bali menjadi spekulatif yang abstrak, yang tidak terjadi secara empirik (Mashad, 2015: 278). Pergeseran makna *menyama braya* yang berakibat pudarnya hubungan harmonis antarumat Islam dan Hindu di Bali menjadikan kerukunan menjadi mitos, sebuah diskursus sosial yang diyakini benar-benar terjadi. Sebagai mitos, kerukunan muncul secara tidak riil dan mengandung makna keperluan sesaat (Tantra, 2015: 171).

Pertanyaannya kemudian adalah apa yang menjadi faktor yang mendorong lahirnya pergeseran sikap masyarakat Hindu Bali terhadap *nyama* Islam atau *nyama* Jawa dan melahirkan sikap-sikap dan perilaku yang tidak lagi berpegang teguh pada *menyama braya*? Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pergeseran sikap dan perilaku orang Bali. Atmadja (2010: 2) menyebut pembangunan dan globalisasi sebagai penyebab persegeran itu. Damayana (2011: 138) melihat kehadiran pendatang, ketertinggalan ekonomi, pengembangan pariwisata, semangat etnisitas dan budaya Bali sebagai penyebab pergeseran sikap, pandangan dan perilaku masyarakat Hindu Bali terhadap *menyama braya*.

Pembangunan tampaknya merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat manapun, termasuk Bali. Pembangunan dinilai sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan maju. Tolok ukur masyarakat yang adil, makmur dan maju adalah masyarakat Barat, yang dipandang mengalami capaian budaya maju terlebih dahulu. Karena itu, budaya ini menjadi acuan pembangunan yang akan mengantarkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, maju dan modern. Jika ingin mencapai budaya itu, masyarakat meski melakukan transformasi menyeluruh dari masyarakat yang tradisional ke masyarakat modern. Masyarakat Bali menurut

Atmadja (2010: 9) pertama kali mengenal dan mengagumi budaya modern di era penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Akibatnya, kiblat budaya Bali bukan lagi ke budaya Jawa-Majapahit, tetapi ke budaya Belanda yang dipandang orang Bali sebagai modern, maju, rasional, dan baik dan berlawanan dengan budaya Bali saat itu yang tradisional, terbelakang, irasional, dan buruk.

Keinginan masyarakat Bali untuk mengadopsi budaya tersebut menguat karena *pertama*, secara historis orang Bali pernah melihat budaya tersebut saat diperkenalkan oleh Belanda abad ke-19, dalam bentuk ilmu dan teknologi yang secara faktual lebih maju dibanding dengan yang dimiliki oleh orang Bali. Di tahun 1920, perkumpulan Surya Kanta di Kota Singaraja menganjurkan orang Bali untuk berkiblat ke Barat untuk mewujudkan kemajuan. *Kedua*, modernisasi dan globalisasi membuat orang-orang Bali mengakses ilmu dan teknologi Barat. *ketiga*, pola pikir Barat yang oposisional dan dikotomis (oposisi biner) diadopsi oleh orang Bali sehingga memandang budayanya sebagai budaya yang tradisional, terbelakang, irasional, dan buruk. Budaya tersebut berbeda dengan budaya Barat yang modern, maju, rasional, dan baik.

Pembangunan dan modernisasi yang terjadi di Bali membuat budaya Bali yang banyak memuat nilai-nilai adiluhung banyak mengalami pergeseran dan perubahan, termasuk makna *menyama braya* yang memandang orang lain sebagai saudara dekat, seperti terwujud dalam istilah *nyama selam* dan *nyama Jawa*. Orang lain yang dipandang sebagai *nyama*, kini berubah menjadi jelata (orang lain, berbeda, pendatang). Dalam konteks subak dulu dikenal istilah *sakehe manyi*, bekerja atas dasar rasa persaudaraan (*menyama braya*) dan kebersamaan yang ditujukan untuk menambah persediaan pangan keluarga, kini telah berubah dan diganti dengan sistem *majeg* (kontrak), tradisi *sekehe numbeg* (perkumpulan membajak sawah) yang didasarkan asas gotong royong dan tolong menolong, kini telah bergeser menjadi sistem upah. Pergeseran itu tak terhindarkan karena pola pikir masyarakat telah bergeser dari pola pikir gotong royong ke pola pikir ekonomis dan pragmatis. Karena

itu nilai-nilai tradisional masyarakat Bali, seperti *sekehe manyi*, *sekehe numbeg* dan *sekehe-sekehe* lainnya telah kehilangan makna esensialnya dan diganti dengan sistem buruh panen, buruh bajak, dan buruh-buruh lainnya yang menuntut adanya upah. Pada konteks kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai solidaritas sosial yang ada dalam masyarakat tradisional pun mulai berubah dan digantikan dengan nilai-nilai modern yang bersifat individualis-materialis (Suda, tt: 6).

Kehadiran pendatang ke Bali sejatinya bukan fenomena baru bagi masyarakat Hindu Bali. Sejak era lama Bali selalu menarik untuk dikunjungi. Sejarah mencatat kehadiran pendatang di era lama memang dibutuhkan diperlukan terutama untuk menjaga Bali dari pelbagai gangguan keamanan dari luar. Di samping itu, kehadiran pendatang juga diperlukan untuk pengembangan ekonomi Bali. Kehadiran pendatang baru menjadi problem ketika Bali memasuki era pariwisata. Sebagai salah satu destinasi wisata yang populer, Bali memang menjadi tempat populer yang banyak dikunjungi wisatawan, baik asing maupun domestik. Di samping wisatawan, Bali juga didatangi oleh banyak pendatang yang ingin mengadu nasib di Bali. Para pendatang ini melihat Bali sebagai tempat mencari peruntungan ekonomis karena sedang berkembang pesat sebagai destinasi wisata. Tetapi, kehadiran pendatang yang menetap dan hidup di Bali melahirkan problem kultural bagi umat Hindu. Pendatang tentu saja bukan sekadar datang untuk berdagang dan bekerja, pendatang juga membawa beragam identitas yang melekat pada dirinya. Pendatang yang Muslim membawa serta identitas agama dan budayanya, begitu juga dengan pendatang yang Nasrani, Buddha, dan agama lainnya. Para pendatang ini tentu saja perlu bertahan hidup, beragam pekerjaan mereka lakukan dengan tekun, sehingga dapat mengubah status sosial dan ekonomi mereka. Seorang pengusaha hotel di Bali berkisah bagaimana ia pertama kali datang ke Bali, ia bekerja sebagai penjaja souvenir di Kuta dan di Pasar Sukawati, kemudian mendapat kepercayaan dari seorang wisatawan asing untuk menyediakan mebel

ukir khas Bali untuk diekspor. Dari kegiatan ekspor itulah ia kemudian berubah, bisa membeli rumah, tanah, usaha mebel hingga hotel. Tentu banyak lagi kisah sukses para perantau dari luar Bali yang seperti itu. Kemajuan ekonomi para pendatang memunculkan kecemburuan di kalangan masyarakat Hindu Bali. Pariwisata seharusnya dapat menyejahterakan mereka, tetapi yang sejahtera justru orang luar Bali. Ditambah lagi, kemajuan pariwisata Bali ternyata tidak saja bertolak dari eksotika budaya Bali yang bernafaskan tradisi Hindu, tetapi berkembang menjadi industri pariwisata yang eksploitatif. Salah satu contoh yang mencolok adalah penimbunan laut menuju Pulau Serangan, di Pulau itu terdapat Pura Sakenan (Denpasar) warisan Danghyang Nirartha, penimbunan itu membuat orang Bali tidak bisa lagi berkunjung dan menjalani ritual ke Pura Sakenan (Mashad, 2014: 264).

Pembangunan, modernisasi, kehadiran pendatang dengan beragam identitas agama dan budayanya, kemajuan ekonomi mereka, pengembangan pariwisata yang mengabaikan ajaran agama Hindu dan nilai-nilai adat mendorong lahirnya semangat identitas dan agama umat Hindu Bali. Semangat identitas etnik dan agama ini mengkristal dalam gerakan ajeg Bali. Gerakan ini ingin menegakkan ajaran-ajaran Hindu dan nilai-nilai adat Bali yang selama ini terabaikan dalam proses pembangunan dan pengembangan pariwisata di Bali. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hindu Bali, gerakan ajeg Bali mendirikan Koperasi Krama Bali (KKB) yang ditujukan menyediakan dana bantuan bagi warga Hindu Bali yang hendak berwirausaha. Selain itu koperasi ini juga merancang berbagai kegiatan pelatihan keterampilan untuk mendukung upaya pemberdayaan ekonomi krama Bali. Salah satu pelatihan yang digulirkan adalah membuat bakso pakraman. Bakso pakraman berbeda dengan bakso pada umumnya yang telah dikenal oleh masyarakat Bali. Bakso pakraman terbuat dari daging babi. Untuk menyukseskan bakso pakraman itu, ada desa pakraman yang melarang warganya untuk membeli bakso lainnya, bahkan akan didenda jika

warga tersebut tetap melakukannya. Gerakan ajeg Bali dalam bidang ekonomi dimaksudkan untuk menandingi kemajuan ekonomi para pendatang di sektor informal.

Akhirnya menurut Damayana (2011: 148) pergeseran konsep *menyama braya* pada masyarakat Hindu Bali saat ini merupakan resistensi budaya atas hegemoni dan dominasi kaum pendatang terhadap penduduk asli. Di masa lalu *menyama braya* merupakan ajaran para leluhur/tetua Bali yang harus dipelihara dan dipraktikkan untuk menciptakan harmoni di tengah-tengah masyarakat tanpa harus membedakan agama, suku, dan budaya. Sekarang *menyama braya* hanya dimaknai sebagai toleransi atau kebersamaan masyarakat yang multi etnis dan multi agama. Pergeseran makna *nyama* menjadi *jelama* terlihat sangat kentara pada terjadinya Bom Bali I di Legian dan Bom Bali II di Jembrana. Bom Bali I dan II melahirkan semangat anti pendatang dan mencurigai umat Islam sebagai pelaku teror. Kecurigaan itu kemudian melahirkan sikap diskriminasi etnis dan agama kepada para pendatang dari Jawa dan Muslim yang melahirkan ketegangan identitas. Terjadi perubahan karakter orang Bali yang penuh perasaan curiga dan kemudian melakukan pemilihan antara penduduk asli (pribumi) dan dengan pendatang. Perubahan karakter itu menguatkan semangat pergulatan dan penguatan identitas dan wacana *Ajeg Bali*.

### **Kompetisi**

Selain kerja sama, akomodasi, toleransi yang sifatnya asosiatif, relasi antar umat Islam dan Hindu Bali juga bersifat disosiatif. Salah satu bentuk dari pola relasi yang disosiatif adalah kompetisi, atau persaingan. Hal itu terlihat dengan sangat jelas di bidang ekonomi. Persaingan di bidang ini, juga memiliki dampak pada interaksi umat Hindu Bali terhadap Muslim dan atau pendatang. Bali yang berkembang menjadi destinasi pariwisata dunia, menarik banyak pendatang untuk mengunjunginya. Ada yang datang sebagai wisatawan, ada juga yang datang untuk melihat peluang ekonomi kemudian menetap di Bali. Pendatang sebagai wisatawan

barangkali menguntungkan masyarakat Bali. Sebaliknya pendatang yang kemudian menetap di Bali untuk mengadu nasib dan mencari rizki menjadi masalah bagi masyarakat Bali, sebab hampir semua sektor ekonomi terutama sektor informal dikuasai oleh pendatang mulai dari penjual nasi keliling, pengelola warung nasi, penjual gorengan, penjual bakso keliling, pengelola pasar senggol, semuanya adalah pendatang. Tidak salah jika ada yang mengatakan bahwa perkembangan pariwisata Bali yang pesat tidak banyak memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat Hindu Bali. Karena sektor-sektor ekonomi lebih banyak dikuasai oleh pendatang. Tetapi, penguasaan sektor informal oleh pendatang itu memiliki alasan, karena menurut Dyana (Damayana, 2010: 139) *pertama*, masyarakat Hindu Bali terlalu sibuk meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusianya, tanpa diiringi dengan kemampuan, keahlian dan kepercayaan diri untuk menciptakan lapangan kerja sendiri, *kedua*, masyarakat Hindu Bali kurang memiliki kemampuan untuk berkompetisi karena mereka memiliki kekayaan materi berupa tanah warisan, sehingga minat untuk bekerja pada sektor formal sangat minim. *Ketiga*, masyarakat Hindu Bali sendiri kurang memiliki minat untuk membeli produk usaha informal yang dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat Hindu Bali. Krama Bali cenderung membeli produk informal yang dibangun dan dikembangkan pendatang. Sebaliknya pendatang sangat jarang mau membeli produk usaha informal yang dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat Hindu Bali. Pendatang yang Muslim, karena taat kepada doktrin agamanya, takut membeli makanan yang dijual oleh Krama Bali, ketakutan itu, terkait dengan status hukum makanan yang dijual orang Bali. Terutama produk makanan yang berjenis daging, apakah itu daging ayam, kambing, dan sapi. Status makanan yang halal dan yang haram sangat melekat dalam kesadaran pendatang Muslim.

Selain itu, ada juga faktor lain yang menjadi sebab mengapa Krama Bali kalah bersaing di sektor ekonomi informal, yakni kecenderungan Krama Bali untuk memilih-milih pekerjaan. Tidak

semua pekerjaan sektor informal mau dikerjakan oleh Krama Bali. Terutama sektor pekerjaan informal yang tergolong kasar atau kotor dalam pandangan Krama Bali. Karena Krama Bali enggan pada pekerjaan sektor informal tersebut, para pendatanglah yang kemudian mengisinya. Berbagai pekerjaan sektor informal yang ditolak Krama Bali adalah tukang batu, tukang gali jalan, tukang got, tukang panen padi, penjual sayur, pedagang kaki lima, tukang cukur, pemulung serta sektor lainnya. pekerjaan sektor informal tersebut diisi oleh para pendatang, mereka tekun, ulet dan kreatif dalam menjalankan pekerjaan di sektor informal tersebut. Ada ungkapan yang sering dikutip terkait dengan gengsi Krama Bali. Ketika ditanya kenapa tidak berjualan bakso? Pada umumnya jawaban mereka adalah: "Jualan bakso, lebih baik nganggur, masih bisa minta nasi ke tetangga (Damayana, 2011: 140). Keengganan Krama Bali untuk bergelut pada sektor ekonomi informal memberi peluang bagi pendatang Jawa-Muslim untuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh Krama Bali. Hampir semua sektor informal dan pekerjaan kasar dikuasai oleh para pendatang, yang mayoritas Jawa-Muslim. Untuk mendorong minat masyarakat Hindu Bali terhadap sektor informal di Bali, Pemerintah Daerah Bali berupaya memfasilitasi masyarakat Hindu Bali untuk berjualan bakso, namun tetap saja Krama Bali tidak tertarik terhadap peluang yang diberikan pemerintah tersebut.

### **Konflik**

Meskipun hubungan umat Islam dan Hindu di Bali terlihat rukun dan harmonis, hubungan kedua komunitas agama tersebut, sejatinya diselimuti sejumlah ketegangan hingga konflik. Hubungan tersebut tidak sampai melahirkan amuk massa atau kekerasan berbasis agama. Pertanyaannya kemudian apa saja hubungan dari kedua komunitas tersebut yang diselimuti konflik? *Pertama*, adalah soal rumah ibadah. Menurut beberapa informan, bagi Muslim di Bali, mendirikan rumah ibadah baik dalam bentuk masjid maupun musala bukan hal yang mudah untuk dilakukan (Wawancara, AR, 2011). Kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah di Bali juga dijelaskan oleh AY salah seorang

warga Muslim urban asal Palembang. Menurutnya, saat ini jumlah umat Islam di Bali cukup banyak, banyak kendala yang mereka hadapi ketika mereka hendak mendirikan rumah ibadah. Izinnya rumit, persetujuan dari lingkungan sekitar atau desa adat juga tidak mudah. Karena kendala-kendala itu, mereka kemudian membeli bangunan seperti ruko dan difungsikan sebagai tempat salat. Pengalihan fungsi ruko menjadi tempat ibadah itu kemudian dipersoalkan oleh masyarakat sekitar (Wawancara, 2016).

Secara historis, kondisi Bali saat ini memang tengah berubah, apalagi sejak Bali menjadi destinasi wisata, Bali menjadi pulau yang penuh hiruk pikuk pariwisata, wisatawan pun tak henti-hentinya datang ke Bali. Di tengah perubahan itu, warga Hindu Bali mulai menyadari bahwa identitas budayanya dan kondisi alamnya saat ini tidak seperti dulu. Sebagai pulau yang dihuni oleh mayoritas Hindu, Bali dulu sunyi dan sesekali terdengar alunan bacaan Trisanti yang syahdu. Kini Bali tidak seperti itu lagi, aktivitas pariwisata yang hingar bingar dan jumlah urban yang terus meningkat membuat Bali berubah. Suara azan yang bergema melalui pengeras suara sahut menyahut di kala waktu salat tiba, dentang lonceng gereja di hari Minggu juga terdengar kencang. Bali berubah menjadi pulau yang dihuni oleh warga yang multi agama. Menyadari keadaan yang tengah berubah itu, warga Bali yang mayoritas Hindu itu tergugah untuk melakukan pembatasan-pembatasan agar identitas kultur dan agamanya tetap hidup. Agama Islam dan agama-agama yang terus berkembang di Bali mau tidak mau menuntut tersedianya rumah ibadah untuk pelaksanaan ajaran-ajaran agama mereka dan mendesak warga Hindu Bali untuk berbagi tanah demi berdirinya rumah ibadah. Kondisi ini menjadi persoalan tersendiri bagi warga Hindu Bali saat ini. Kondisi tersebut berbeda dengan Bali di era kerajaan dulu. Saat itu hubungan warga Hindu Bali dengan Islam adalah hubungan yang mutualsimbiosis, saling menguntungkan. Umat Islam yang datang ke Bali saat itu difungsikan sebagai mitra kerajaan untuk keamanan kerajaan dan puri. Karena itu, menurut Kartini (2011), pada era kerajaan

Bali, umat Islam tidak memiliki kendala dalam pembangunan rumah ibadah. Bahkan raja tidak segan memberi tanah untuk pembangunan masjid. Hal itu terjadi karena kontribusi masyarakat Islam bagi kerajaan saat itu cukup signifikan. Sebenarnya kesulitan yang dihadapi umat Islam bukan hanya soal bagaimana mendirikan rumah ibadah, tetapi mereka juga kesulitan memperoleh tanah untuk pemakaman. Kartini (2011) menerangkan kesulitan memperoleh tanah untuk pemakaman jenazah dialami oleh warga Muslim di Denpasar, Badung, Jembrana, Buleleng, dan Gianyar. Di Buleleng misalnya, pemerintah daerah bahkan pernah mengubah fungsi tanah untuk pemakaman menjadi tempat pariwisata, padahal tanah tersebut merupakan tanah wakaf. Masih di Buleleng, pernah ada seorang wanita Muslimah yang menguburkan jenazah suaminya di pekarangan depan rumahnya atas wasiat sang suami. Tindakan ini menuai protes warga Hindu, karena tanah tempat tinggal warga muslimah tersebut masuk dalam wilayah desa pakraman. Tokoh agama Islam dan Hindu kemudian bertemu untuk mencari solusi atas masalah yang timbul di tengah-tengah mereka, hasil pertemuan itu adalah memindahkan jenazah yang telah dimakamkan di pekarang rumah itu ke tempat pemakaman yang lebih layak. Warga Muslimah itu pun setuju untuk memindahkan makam suaminya (Kartini, 2011: 115-145).

Studi Bashori A. Hakim (2011: 83) di Kota Denpasar menjelaskan ada dua musala yang sulit didirikan oleh umat Islam di Kota Denpasar. Kedua musala itu adalah al-Syafi'iyah dan al-Qari, musala al-Syafi'iyah di Denpasar Utara. Pada awalnya keberadaan musala ini tidak dipersoalkan oleh masyarakat sekitar, meskipun dipergunakan untuk aktivitas keagamaan dan peribadatan oleh jemaah musala. Namun, tahun 2006, musala yang telah dirintis pendiriannya sejak tahun 1988 ini mulai dipersoalkan oleh warga Hindu sekitar musala. Mereka keberatan dan merasa terganggu oleh adanya sejumlah sepeda motor milik jemaah musala yang melaksanakan salat jumat. Ketika musala itu hendak digeser ke tanah yang telah dibeli oleh jemaah musala, warga Hindu sekitar musala juga menyatakan

keberatannya dengan alasan pergeseran atau pemindahan musala tidak melalui musyawarah warga dan meminta rencana tersebut dihentikan. Atas permintaan warga Hindu sekitar musala, panitia menghentikan kegiatan pemindahan atau penggeseran musala, namun ketika jemaah musala hendak melaksanakan salat Jumat pada 23 Mei 2008 tiba-tiba jemaah musala digiring oleh warga Hindu sekitar musala agar keluar musala, dan sekelompok warga Hindu tersebut menyegel musala dengan alasan musala tersebut tidak ada izin warga sekitar. Menurut Hakim, hingga saat studi itu dilakukan, musala tersebut belum bisa lagi digunakan untuk sarana kegiatan keagamaan dan ibadah, berbagai upaya warga Muslim jemaah musala untuk menggunakan kembali musala tersebut tidak membuahkan hasil. Salah satu syarat yang tak bisa diperoleh oleh pengurus musala adalah izin atau persetujuan pembangunan rumah ibadah dari pendamping dan kelian adat. Meskipun FKUB telah berupaya melakukan mediasi atas persoalan rumah ibadah tersebut, namun mediasi tersebut tidak membuahkan hasil. Penolakan pendirian tempat ibadah juga terjadi di Denpasar Utara, pendirian musala al-Qari ditolak warga Hindu. Musala yang pendiriannya dirintis sejak tahun 1999 sempat disegel oleh warga Hindu sekitar musala, tetapi warga Muslim tetap menggunakannya sebagai tempat salat, melihat hal tersebut warga Hindu menyegel dan menggembok musala dan mendatangi setiap rumah warga muslim agar tidak salat di musala al-Qari, yayasan al-Qari mewakili warga Muslim pada 2 Agustus 2003 melaporkan hal tersebut ke Kapolda Bali. FKUB Desa Ubung dan FKUB Kota Denpasar kemudian memprakarsai pertemuan warga untuk mendialogkan masalah tersebut. Hasil pertemuan itu disepakati untuk mencabut laporan intimidasi ke Polda, penggantian dan pembentukan pengurus Warga Muslim Dusun Tegal Kori. Hingga 19 Oktober 2003, persoalan yang melilit musala al-Qari belum kelar dan musala belum bisa digunakan sebagai tempat ibadah (Hakim, 2011: 93).

Penolakan atas pendirian rumah ibadah juga terjadi di Perumahan Bumi Permai Desa Dalung

Permai Kuta Utara, Kabupaten Badung (Alifiati, 2014: 169-184). Warga Hindu menolak memberi izin pendirian tempat ibadah bagi warga Muslim, selain menolak pendirian musala di perumahan itu, warga Hindu juga menolak penyelenggaraan proses pembelajaran keagamaan nonformal di perumahan tersebut. Penolakan terakhir ini disesalkan oleh kalangan Muslim. Bagi mereka proses pembelajaran keagamaan adalah kebutuhan mendesak bagi mereka terutama untuk membekali anak-anak mereka pengetahuan agama, terutama pengetahuan membaca Alquran dan pengetahuan ibadah-ibadah ritual bagi anak-anak mereka. Meskipun kecewa dengan penghentian proses pembelajaran keagamaan nonformal bagi anak-anak mereka di kompleks perumahan itu, kalangan Muslim tetap melakukan interaksi sosial dengan masyarakat Hindu di perumahan tersebut. Sementara itu, larangan untuk mendirikan tempat ibadah dapat mereka maklumi karena mereka masih dapat menunaikan ibadah di tempat lainnya yang berada di luar kompleks perumahan Bumi Permai.

Menurut Pamungkas (2014: 286-316) ada beberapa konflik yang kerap kali muncul dalam konteks relasi Muslim dan Hindu di Bali. Konflik-konflik itu, antara lain dipicu oleh *pertama*, penggunaan pengeras suara oleh komunitas Muslim saat mengumandangkan azan sebagai panggilan salat lima waktu. Suara azan yang keluar dari pengeras suatu itu, kerap kali dipandang mengganggu warga Hindu sekitar masjid atau musala. Sebaliknya komunitas Muslim yang tinggal di sekitar pura juga merasa terganggu ketika warga Hindu melakukan pembacaan Trisandhi. Menurut AR, pembacaan Trisandi menggunakan pengeras suara sebenarnya merupakan tradisi baru bagi warga Hindu, sebab sebelumnya pembacaan Trisandi dilakukan tanpa pengeras suara (Wawancara, 2013). Pemuka-pemuka agama Hindu merasa, bahwa Bali yang mayoritas memeluk Hindu justru jarang terdengar pembacaan Trisandi, yang terdengar malah azan sebagai panggilan salat yang keluar dari masjid atau musala. Berangkat dari kesadaran seperti Trisandi kemudian mulai dibaca dengan menggunakan pengeras suara.

*Kedua*, konflik juga kerap dipicu oleh pemanfaatan tempat-tempat ibadah oleh warga Muslim. Sebuah masjid atau musala yang telah berdiri pada awalnya tidak menjadi masalah bagi warga Hindu, tetapi ketika masjid atau musala di satu tempat digunakan oleh warga Muslim untuk kegiatan pengajian dan kegiatan lain yang sejenis dan melibatkan warga Muslim lainnya yang datang dari luar desa atau kecamatan, kerap kali dipandang mengganggu ketenangan hidup warga Hindu di sekitar masjid atau musala tersebut. Apalagi jika kegiatan yang dilakukan oleh warga Muslim itu bertepatan dengan peringatan hari-hari keagamaan warga Hindu Bali. Hari Raya Nyepi bagi warga Hindu bertepatan dengan hari Jumat. Bagi warga Hindu semua masyarakat yang ada Bali tidak boleh menyalakan lampu selama satu hari penuh, sementara bagi warga Muslim. Salat Jumat adalah kewajiban yang tak boleh ditinggalkan, kewajiban itu harus ditunaikan. Menghadapi situasi seperti itu, kedua tokoh agama, FKUB dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota pada umumnya melakukan kompromi-kompromi, tetapi hasil kompromi itu tidak sepenuhnya dapat diterima oleh umat di akar rumput. Pada kasus seperti itulah biasa konflik tak bisa dihindarkan (Pamungkas, 2014: 286-316). *Ketiga*, adalah izin pendirian rumah ibadah. Warga Muslim di Bali tidak mudah untuk mendirikan masjid atau musala. Komunitas Muslim yang hendak mendirikan masjid atau musala harus berjumlah 40 (empat puluh) kepala keluarga (KK). Sebagai warga minoritas tentu saja tidak mudah bagi Muslim Bali untuk memenuhi syarat tersebut. Karena itu, syarat 40 KK tersebut seringkali diabaikan oleh warga Muslim di Bali. Dengan kata, seringkali warga Muslim, karena membutuhkan rumah ibadah mengabaikan SK Gubernur. Selain syarat 40 KK, izin mendirikan rumah ibadah bagi warga non-Hindu harus memperoleh persetujuan dari lingkungan. Kata lingkungan yang dimaksud dalam perda pendirian rumah ibadah tidak jelas batasannya, "Lingkungan yang dimaksud dalam Perda itu apakah mencakup banjar, desa atau RT." Karena dalam praktiknya yang memiliki peran dalam persetujuan itu adalah desa adat atau desa pakraman.

Karena kesulitan yang dialaminya, seringkali komunitas Muslim dalam satu desa tertentu mengabaikan SK Gubernur Bali No. 583/1991 tentang pendirian tempat ibadah itu. Ada banyak kasus yang dapat disebut sebagai contoh: Masjid Nurul Iman Khomairon, pada mulanya didirikan tanpa didahului dengan mengurus izin, yang dilakukan terlebih dahulu adalah membangun fisik masjid. Setelah pembangunan fisik selesai, warga Muslim kemudian mengurus perizinannya. Bahkan karena sulitnya memperoleh izin pendirian rumah ibadah, tidak jarang warga Muslim mengajukan izin tapi tidak ditujukan untuk membangun rumah ibadah, tetapi ditujukan untuk pembangunan gedung. Setelah itu, perlahan tapi pasti, gedung tersebut diubah fungsinya menjadi masjid. Hal seperti itu terpaksa dilakukan karena warga Muslim yang tinggal di daerah itu tak memenuhi syarat pendirian rumah ibadah. Sebagai minoritas jumlah mereka tentu tak mencapai 40 KK. Pendirian masjid atau musala di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Singaraja, menurut Pamungkas (2014: 286) adalah contoh lain sarana ibadah yang sudah dibangun namun tidak memiliki izin. Pihak MIN Singaradja, berupaya memenuhi berbagai syarat yang telah ditentukan. Namun izin tak kunjung diberikan. Pembangunan kemudian dilakukan tanpa mengantongi izin pendirian rumah ibadah, dan hingga sekarang belum pernah ditegur.

Menurut Kartini (2011: 135-140), kendala komunitas Muslim untuk mendirikan rumah ibadah terjadi di berbagai daerah di Bali, bukan saja di Denpasar dan Badung, tetapi juga di Buleleng misalnya warga Muslim kesulitan membangun masjid Jabal Nur. Mereka juga mendapat tentangan dari warga Hindu ketika mendirikan majelis taklim dan taman pendidikan Alquran (TPA). Masjid Jabal Nur awalnya diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan warga Muslim tetapi dihentikan pembangunannya karena tidak punya izin. Izin pendirian tidak diperoleh karena tanah masjid tersebut masuk dalam kawasan desa adat (desa pakraman). Kasus masjid Jabal Nur ini menarik. Di satu sisi letak masjid masuk dalam wilayah desa dinas, karena itu desa dinas memberi izin

kepada warga Muslim untuk membangun masjid. Tetapi di sisi lain, letak masjid juga masuk wilayah hukum desa pakraman dan merasa tidak mengeluarkan izin untuk pembangunan masjid tersebut, sehingga berhak untuk membongkar masjid tersebut. Setelah pihak pengelola masjid melakukan pendekatan kepada desa pakraman, masjid tersebut akhirnya tidak jadi dibongkar. Warga Muslim Buleleng menurut Kartini juga tengah berjuang untuk memperoleh izin pembangunan musala di rumah sakit umum. Meskipun sudah mengajukan persetujuan bupati dan lembaga legislatif daerah, namun hingga saat ini izin pembangunan musala itu belum diperoleh.

Kendala-kendala yang dialami warga Muslim dalam pendirian rumah ibadah di Bali menurut Pamungkas (2014: 287-316) disebabkan antara lain oleh: syarat jumlah kepala keluarga (KK) yang tinggal di satu lingkungan yang sama tidak mencapai 40 KK. Jumlah ini memang berat, karena jumlah warga Muslim yang tinggal di satu lingkungan di Bali pada umumnya jumlahnya kecil. Selain itu, ada juga kendala lain seperti adanya SK Gubernur No. 583/1991 tentang Prosedur Pendirian Tempat Ibadah.

Konflik atau perselisihan antarwarga Muslim dan Hindu di Bali kerap kali terjadi di desa pakraman. Perselisihan itu disebabkan oleh pandangan warga Hindu terhadap warga Muslim. Di desa pakraman, warga Muslim merupakan warga tamu (krama tamu), sementara warga Hindu merupakan warga utama. Sebagai warga tamu, mereka diperlakukan secara berbeda oleh desa pakraman (Pamungkas, 2014: 287-316). Perselisihan warga Muslim dan Hindu juga kerap terjadi karena ketidaktahuan warga Hindu terhadap ajaran Islam tentang ibadah. Bagi warga Muslim, salat bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di tempat di mana warga Muslim bertempat tinggal. Ketika waktu salat tiba, warga Muslim tentu akan mencari tempat ibadah yang ada di sekitar mereka. Warga yang tinggal di Denpasar misalnya, bisa jadi menunaikan salat di masjid atau musala yang ada di Badung, bahkan di mal yang ada tempat salatnya. Hal seperti itu bagi warga Hindu adalah aneh karena di tempat tinggal warga Muslim telah ada tempat salat, seharusnya

mereka salat di sana, sebab warga Hindu akan selalu melaksanakan ibadah di tempat di mana mereka tinggal. Akibat ketidaktahuan itu, sebagian warga Hindu protes, mengapa musala atau masjid kerap kali didatangi pendatang dari luar, dan meminta agar orang Muslim dari luar Bali tidak salat di masjid atau musala di Bali. Bagi warga Hindu, tempat ibadah merupakan tempat yang sakral. Karena itu, jika ada tempat kerja atau tempat perbelanjaan yang digunakan sebagai tempat salat, maka akan banyak tempat yang sakral. Sementara bagi Muslim tempat ibadah tidak harus di tempat sakral, di mana pun Muslim dapat melaksanakan salat, (Pamungkas, 2014:207-316; Wawancara, MUI Provinsi Bali, 2017).

### **Faktor Penentu Pola Hubungan**

Seperti telah dijelaskan di atas, hubungan warga Muslim dan Hindu di Bali terbagi menjadi dua pola utama, yakni pola asosiatif dan disosiatif. Jika selama ini hubungan antarumat Islam dan Hindu di Bali selalu digambarkan sebagai hubungan yang harmonis: kerja sama, akomodatif, dan toleransi. Senyatanya tidak selalu demikian, sebab hubungan dua komunitas tersebut juga memiliki pola yang kompetitif dan konflik. Pertanyaannya kemudian adalah apa faktor penentu dari masing-masing pola hubungan itu? Pola hubungan kerja sama di berbagai bidang antara warga Muslim dan Hindu di Bali ditentukan oleh faktor sejarah. Seperti diketahui secara historis hubungan Muslim dan Hindu di Bali sudah terjalin lama, sejak era Dalam Waturenggong, ketika kerajaan Bali yang berpusat di Gelgel masih menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Bahkan, kerja sama antara warga Muslim dan Hindu Bali terus berlanjut hingga kerajaan Bali pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Kebutuhan keamanan dan ekonomi membuat kerajaan-kerajaan kecil di Bali meminta bantuan prajurit-prajurit Muslim asal Bugis-Makassar. Selain itu, kebutuhan ekonomi membuat hubungan kerja sama perdagangan antara Muslim dan Hindu di Bali menjadi tidak terhindarkan. Pola hubungan kerja sama itu bahkan berlanjut hingga sekarang terutama kerja

sama di bidang perdagangan. Pariwisata Bali tentu saja membutuhkan arus barang keluar dan masuk Bali, dan tidak mungkin hal tersebut dikerjakan oleh orang Bali sendiri, tentu harus melibatkan banyak pihak, termasuk warga Muslim yang ada di Bali.

Pola hubungan akomodatif yang dilakukan oleh warga Muslim Bali dimaksudkan agar kehadiran mereka di Bali dapat diterima oleh warga Hindu. Hubungan yang akomodatif tersebut terbukti dapat diterima oleh warga Bali dan melahirkan hubungan kekerabatan antara kedua komunitas melalui hubungan perkawinan dan melahirkan pandangan yang positif terhadap warga muslim yang oleh warga Hindu Bali disebut sebagai *nyama selam*. Sementara pola hubungan yang toleran ditentukan oleh faktor keinginan warga Muslim dan Hindu untuk berintegrasi. Keduanya menafikan identitas masing-masing untuk saling menghormati, tolong menolong, dan membiarkan warga Muslim dengan identitas keagamaannya, begitu sebaliknya warga Muslim membiarkan warga Hindu dengan identitas keagamaannya. Upaya membangun pola hubungan toleran ini sebenarnya juga tidak bisa dilepaskan dari upaya tokoh agama dan pemerintah dalam memupuk rasa kebangsaan, persudaraan di antara mereka. Selain itu, pola hubungan yang toleran itu, juga dibangun dari ajaran agama masing-masing.

Pola hubungan kompetitif antara warga Muslim dan warga Hindu Bali dipicu oleh hadirnya pendatang Muslim ke Bali. Warga Muslim yang datang ke Bali tidak semua bekerja di sektor formal, seperti guru, polisi, tentara, dosen, wartawan, dan pegawai negeri. Mayoritas warga Muslim dan menetap di Bali bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, pekerja bangunan, buru tani, padagang bakso, penjual nasi, pemulung, dan pekerja kasar lainnya. Sebagai perantau, warga Muslim tersebut berupaya hidup hemat hingga akhirnya mereka dapat membeli properti mulai dari tanah, rumah, dan kendaraan bermotor. Status ekonomi warga Muslim perantau itu melahirkan kecemburuan di kalangan warga Hindu Bali dan memuncak dengan lahirnya Bom Bali I dan Bom Bali II. Stigma warga Muslim pun muncul, jelaham Jawa, pendatang adalah masalah, razia KTP dan lahirnya gerakan Ajeg Bali. Kemajuan

ekonomi pendatang telah melahirkan gerakan bakso pakraman meskipun tidak bertahan lama karena tidak laku. Kedudukan warga Muslim di desa pakraman pun tidak sama dengan warga Hindu Bali. Warga Muslim di desa pakraman pada umumnya diposisikan sebagai warga tamu, bukan sebagai warga utama sebagaimana warga Hindu Bali.

Pola hubungan warga Muslim dan warga Hindu Bali yang tidak harmonis alias konflik seperti tergambar pada pendirian rumah ibadah, perayaan hari raya keagamaan selain ditentukan oleh faktor komunikasi masing-masing warga, juga ditentukan oleh faktor adat yang dipegang kuat oleh warga Hindu Bali di desa pakraman. Kemudian ada juga faktor ketidaktahuan masing-masing warga atas ajaran masing-masing agama. Warga Muslim tidak sedikit yang tidak mengerti adat dan ajaran agama Hindu tentang rumah ibadah dan tanah, begitu juga warga Hindu tidak semua tahu tentang ajaran ibadah yang ada dalam ajaran Islam.

Pola hubungan yang toleran tampaknya perlu ditumbuhkan di tengah-tengah warga Muslim dan warga Hindu Bali. Perbedaan identitas agama, harus didialogkan di antara kedua komunitas jika hubungan harmonis dan saling hormat menghormati merupakan cita-cita yang hendak diwujudkan. Nilai-nilai lokal dan nilai-nilai agama yang menekankan moralitas dan menjunjung tinggi kemanusiaan perlu diperkenalkan dan ditumbuhkembangkan oleh para tokoh agama di kedua komunitas Muslim maupun Hindu Bali.

## Penutup

Hubungan antara warga Muslim dan Hindu di Bali tidaklah tunggal, namun beragam. Pola hubungan kedua komunitas itu, tidak saja kerja sama, akomodatif, dan toleransi, tetapi juga kompetitif dan konflik. Hubungan kedua warga yang berbeda agama tersebut sangat dinamis. Ada kalanya harmonis dan ada kalanya dililit oleh kendala-kendala yang melahirkan konflik. Tetapi, secara umum pola hubungan keduanya adalah harmonis.

Realitas demikian perlu dipahami agar keduanya tidak merasa bahwa hubungan mereka

selama ini tidak ada masalah. Kedua warga tersebut harus menyadari bahwa hubungan yang harmonis sebagai hubungan yang perlu dijaga dan dilestarikan sementara hubungan yang tidak harmonis perlu didialogkan dan dikomunikasikan. Peran tokoh agama, tokoh adat, forum kerukunan umat beragama dan pemerintah sangat strategis dalam membangun hubungan yang harmonis itu dan sangat strategis untuk memediasi segala bentuk hubungan yang dililit oleh masalah. Tetapi, karena peran strategis itu, para tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah sering alpa akan dinamika hubungan kedua warga tersebut pada tataran akar rumput. Akibatnya, tak jarang apa yang dikatakan oleh elit agama, adat, dan pemerintah berbeda dengan apa yang mewujud pada tataran masyarakat.

Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hubungan yang harmonis di tengah-tengah warga Muslim dan Hindu Bali merupakan tugas bersama semua pihak, baik tokoh agama, tokoh adat, pemerintah dan masyarakat. Sikap-sikap yang merendahkan terhadap warga Muslim pendatang pasca Bom Bali I dan II perlu dikikis habis, warga Muslim pendatang pun perlu memperbaiki citra mereka. Meskipun hukum adat yang berlaku di desa pakraman tidak bisa diubah karena begitulah adanya, maka hal-hal yang terkait dengan pembangunan rumah ibadah dan pemakaman warga Muslim perlu disosialisasikan di kalangan warga Muslim bahwa kondisi Bali berbeda dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, karena itu hal-hal terkait ajaran agama Islam yang memang sulit dilaksanakan karena berbenturan dengan adat atau hari raya keagamaan warga Hindu perlu didialogkan bersama warga Hindu Bali, agar warga Hindu Bali memahami posisi warga Muslim terkait dengan pelaksanaan ajaran agamanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Aliffiati. (2014). "Interaksi Sosial Antarumat Beragama di Perumahan Bumi Dalung Permai Desa Dalung, Kuta Utara, Badung" dalam *JURNAL KAJIAN BALI*, Volume 04, Nomor 01, April.
- Armini, I Gusti Ayu. (2013) "Toleransi Masyarakat Multi Etnis dan Multi Agama dalam Organisasi Subak di Bali," dalam *Jurnal Patanjala* Vol 6 No. 1.
- Bales, Robert F. (1954). *Social Interaction*, California: The Rand Corporation.
- Basyir, Kunawi. (2016). "Membangun Kerukunan antarumat Beragama Berbasis Budaya Lokal Menyama Braya di Denpasar Bali," dalam *Religio Jurnal Studi Agama-agama* Vol. 6 No. 2.
- Diana, Nina. (2016). "Islam Masuk ke Bali dan Dampaknya terhadap Perkembangan Islam di Bali," dalam *Jurnal Tamaddun* Vol 4 Edisi 2 Juli-Desember
- Fiske, Alan Page. (1992). "The Four Elementary Forms of Sociality: Framework for a Unified Theory of Social Relations," *Psychological Review*, Vol 99 No. 4.
- Freese, Lee and Peter J. Burke, Persons, Identities, and Social Interaction, in B. Markovsky, et al. (eds.) *Advances in Group Processes*, Vol. 11. Greenwich, Conn: JAI Press.
- Ismail, Arifuddin. (2010). "Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama: Fenomena Keagamaan di Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Barat," *Jurnal Analisa*, Volume XVII, No. 02, Juli - Desember.
- Jannah, Siti Raudhatul. (2012). "Kegalauan Identitas: Dilema Hubungan Muslimin dan Hindu di Bali," dalam *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16 No. 2 Desember.
- Karim, M. Abdul. (2016). "Toleransi Umat Beragama di Desa Loloan, Jembrana, Bali Ditinjau dari Perspektif Sejarah," dalam *Jurnal Analisis* Volume XVI, Nomor 1, Juni.
- Kartini. (2011). "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali". dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia*. Edisi XXXVII No. 2. hlm. 116.
- Kymlicka, Will. (1992). "Two Models of Pluralism and Tolerance," *Analyse und Kritik · January*. DOI: 10.1515/auk-1992-0103.
- Pageh, I Made, Wayan Sugiarta, dan Ketut Sedana Artha. (2013). "Faktor Integratif Nyma Bali-Nyama Selam: Model Kerukunan Masyarakat pada Era Otonomi Daerah di Bali," dalam *Jurnal Kajian Bali* Volume 03 Nomor 01, April.
- Pamungkas, Cahyo. (2014). "Toleransi Beragama dalam Praktik Sosial: Studi Kasus Hubungan Mayoritas dan Minoritas," dalam *Episteme* Vol. 9, No. 2, Desember.

- Sujarwanto, I. (2012). "Interaksi Sosial Antar Umat Beragama: Studi Kasus Pada Masyarakat Karangmalang Kedungbanteng Kabupaten Tegal," *Journal of Educational Social Studies*, Vol. 1 No. 2.
- Suwindia, I Gede, Machasin, dan I Gede Parimartha, (2012). "Relasi Islam dan Hindu: Perspektif Masyarakat Bali," dalam *Jurnal Al-Ulum* Volume 12 Nomor 1, Juni.
- Suwindia, I Gede. (2012). "Relasi Islam dan Hindu Perspektif Masyarakat Bali," *Jurnal Al-Ulum*, Volume. 12, Nomor 1, Juni.
- Sztompka, Piotr, (2008). "The Focus on Eeryday Life a New Tyrn in Sociology, *European Reiew*, Vol 16 No. 1.
- United Nation. (1997). *Defining Tolerance*, United Nation. Wildaniyati, 2018. "Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama Eksistensi Masyarakat Islam di Bali Pasca Bom Bali Tahun 2002-2012," *Jurnal Humanis*, Fakultas Ilmu Budaya Unud, Vol. 22 No. 1, Februari. DOI: 10.24843/JH.2018.v22.i01.p19.
- Wulandari, Riza. (2017). "Tradisi Mengibung: Studi Kasus Singkretisme Agama di Kampung Islam Kepaon Bali," dalam *Gulawentah Jurnal Studi Sosial* Volume 2 Nomor 1 Juli.
- Buku**
- Atmadja, Nengah Bawa, (2010). *Genealogi keruntuhan Majapahit Islamisasi, Toleransi dan Pemertahanan Agama Hindu di Bali*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (2010). *Ajag Bali Gerakan, Identitas Kultural dan Globalisasi*. Yogyakarta: LkiS.
- Boer, Niels-Ingvar, Peter J. An Baalen, Kuldeep Kumar. (2004). "The Implicatioans of Diffreent Models of Social Relations for Understanding Knowledge Sharing," dalam *Organizations as Knowladge Systems*. London: Palgrave Macmillan.
- Budarsa, Gede. "Karakteristik Budaya Komunitas Islam Pegayaman Buleleng Bali," Bali, Program Studi Antropologi Sastra dan Budaya Universitas Udayana, tt.
- Damayana, I Wayan. (2011). "Menyama Braya: Studi Perubahan Masyarakat Bali," Salatiga: Disertasi Universitas Kristen Satya Wacana.
- Khalikin, Ahsanul dan Fathuri (Ed.). (2006). *Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Parmiti, Ni Nyoman. (1998). "Masyarakat Islam di Badung 1891-1990. Denpasar: Skripsi Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar.
- Saidi, Saleh dan Yahya Anshori (eds). (2002). *Sejarah Keberadaan Umat Islam di Bali, Denpasar: MUI*.
- Sarlan. (2009). *Islam di Bali: Sejarah Masuknya Agama Islam ke Bali*. Denpasar: Bidang Bimas islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Balai.
- Scheinkman, Jase A. "Social Interaction," Princeton University and NBER.
- Skripsi, Tesis, Disertasi**
- Soviawan, I Putu, I Wayan Landrawan, dan Ratna Artha Windari. (2013). "Menyama Braya dalam Kehidupan Masyarakat Islam dan Hindu di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Tahun 2013," Bali, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sumbulah, Umi dan Nurjannah. (2013). *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Suputra, I Ketut. (2008). "Efektivitas Pengelolaan Sumber Air untuk Kebutuhan Air Irigasi Subak di Kota Denpasar". Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana. Denpasar.
- Tunner, H. Jonathan. (1988). *A Theory of Social Interaction*, California: Stanford Uniersity Press.
- Ulum, Raudatul dan Budiyo (Eds.). (2016). *Survey Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2015*, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Yuliani, Ni Putu. (1993). "Kerukunan antarumat Beragama di Jembrana dan Buleleng 1856-1990: Suatu Tinjauan Sejarah." Denpasar: Skripsi Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar.
- Internet**
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, (2018). "Penduduk Provinsi Bali Menurut Agama yang Dianut Hasil Sensus Penduduk 2010," <http://bali.bps.go.id/2018>, diakses 24 Mei 2018.
- Tirthayasa, Made. (2017). "Tradisi Umat Islam Islam Desa Pegayaman," dalam <https://www.dewatanews.com/2015/07/tradisi-unik-umat-islam-desa-pegayaman.html>. diakses 2 April.